

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA 1 MUHAMMADIYAH KOTA PALEMBANG

Asril Sairi¹⁾, M. Safrizal²⁾

SMA Muhammadiyah 1 Palembang¹⁾, SMA Negeri 1 Betung²⁾
asrilsairi84@gmail.com

Abstrak

Sebagian besar kualitas rendah disebabkan oleh manajemen dan kebijakan pendidikan yang buruk. Sekolah warga hanyalah implementasi kebijakan yang telah mengatur atasannya. Adanya manajemen berbasis sekolah, masalah terkait pendidikan yang diharapkan dapat teratasi. Sekolah-sekolah pemberdayaan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, selain menunjukkan sikap Pemerintah terhadap tuntutan respon masyarakat juga merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pendidikan yang adil. Penekanan pada aspek-aspek dari sifatnya adalah kepatuhan mendalam dan bersyarat dengan masalah yang dihadapi dan politik yang dianut oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam peningkatan pendidikan di SMA Negeri 1 Muhammadiyah Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya membawa tentang adanya implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA 1 Muhammadiyah Palembang, antara lain: 1) sekolah memiliki kemandirian dalam mengembangkan sumber daya manusia. 2) menumbuhkan rasa tanggung jawab sekolah warga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3) pengembangan kreativitas sekolah dalam melaksanakan program. 4) prestasi yang diperoleh sekolah. Setelah pelaksanaan program peningkatan pendidikan di SMA Muhammadiyah Palembang 1, terus mengalami peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 5) meningkatkan akuntabilitas di sekolah memiliki lulusan yang diserap di PTN terpisah.

Kata kunci: manajemen berbasis sekolah (MBS), kualitas pendidikan.

Abstract

Most of the low quality caused by poor management and educational policy. Citizen schools is just the mere implementation of the policy has set his superiors. The existence of the school-based management, the expected education related problems can be resolved. Empowerment schools by providing greater autonomy, in addition to showing the attitude of the Government towards the demands of the community response is also a means of increasing the efficiency, quality, and equitable education. The emphasis on these aspects of its nature is circumstantial and conditional compliance with the problems encountered and the politics espoused by the Government. This research aims to clarify the implementation of School-based management (SBM) in educational enhancement in SMA 1 Muhammadiyah Palembang. The methods used in this research is qualitative method. Data collection techniques on research usin interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used in this research is the analysis of kualitatif through the presentation of data, data reduction and withdrawal of the conclusion. The results brought about the existence of the school-based management implementation at SMA 1 Muhammadiyah Palembang, among other things: 1) school has independence in developing human resources. 2) foster a sense of responsibility the citizens schools in carrying out its duties and functions. 3) development of creativity of the school in carrying out the program. 4) achievements earned the school. After the implementation of the programme of educational enhancement in SMA Muhammadiyah Palembang 1, continue to experience increased achievement both academic and non academic. 5) increase accountability in the school has graduates who are absorbed in the PTN apart.

Keywords: school-based management (SBM), quality of education.

Pendahuluan

Upaya peningkatan mutu telah banyak dilakukan, tetapi pendidikan masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan antara lain adalah rendahnya mutu pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Minarti (2011) bahwa: “Faktor-faktor penyebab kurang berhasil upaya peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input-oriented* dan pengelolaan pendidikan yang sentralistik dan *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat”. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi di bidang pendidikan. Sistem desentralisasi di bidang pendidikan telah memberikan peluang kepada sekolah untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sebagian besar rendahnya mutu disebabkan oleh buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Warga sekolah hanyalah pelaksanaan belaka dari kebijakan yang telah ditetapkan atasannya. Pendapat Sallis ini mendukung pendapat Juran, salah seorang begawan mutu dunia. Juran berpendapat bahwa masalah mutu, 85% oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya (Usman, 2013).

Tugas-tugas pendidik adalah menye-diakan lingkungan belajar yang baik untuk membentuk, mengembangkan dan memantapkan karakter peserta didiknya (Kristiawan, 2016). Tujuan pemerintah memberlakukan otonomi daerah di bidang pendidikan yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan formal dapat mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah di bidang pendidikan pemerintah berupaya dan bertekad untuk memberdayakan sekolah di seluruh jenjang pendidikan. Maka dari

itu, semua urusan dan wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, bahkan dapat diserahkan langsung kepada sekolah itu sendiri. Dalam hal ini, sekolah harus mampu memberdayakan sumber dayanya dengan meningkatkan kegiatan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Padahal pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. dan apabila dikaji lebih lanjut beberapa komponen penentu peningkatan mutu sekolah antara lain adalah manajemen pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah salah satu kebijakan dalam peningkatan manajemen sekolah adalah implementasi manajemen berbasis sekolah.

Adanya manajemen berbasis sekolah, diharapkan dapat menghasilkan guru yang profesional sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan relevan dengan tuntutan perkembangan dalam masyarakat. Diterapkannya, MBS diharapkan permasalahan-permasalahan terkait pendidikan dapat terselesaikan. MBS memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. MBS mempunyai tujuan utama sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suryosubroto (2004) sebagai berikut: (1) Mensosialisasikan konsep dasar manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat; (2) Memperoleh masukan supaya konsep manajemen dapat diimplementasikan dengan mudah sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural; (3) Menambah wawasan pengetahuan masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan khususnya peningkatan mutu pendidikan; (4) Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlihat berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan; (5) Menggalang

kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan dari penerapan manajemen berbasis sekolah tersebut sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pada standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.

Implementasi MBS diharapkan mampu menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. Warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan harus bergerak aktif untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Adanya hubungan kemitraan yang kuat antar *stakeholders* dan juga terciptanya sekolah yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program sekolah. Selain itu, orangtua serta masyarakat sekitar juga harus terlibat secara aktif dalam membantu pelaksanaan manajemen sekolah. Jika kegiatan manajemen sekolah berjalan dengan baik secara terus menerus tentu akan berdampak positif bagi warga sekolah dan juga meningkatnya mutu pendidikan di sekolah.

Hasil observasi membuktikan bahwa masih kurangnya partisipasi guru, komite sekolah dan peran serta masyarakat dalam menyusun program perencanaan. Dalam proses pembelajaran guru belum mampu untuk

berkreasi, dan evaluasi program sehingga berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan Implementasi MBS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena salah satu bentuk metode yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Sugiyono (2009), metode penelitian kualitatif adalah: metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian bertempat di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah pada SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang. Semua komponen ini berpengaruh terhadap penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Komariah (2010) mengemukakan bahwa: “Pengumpulan data penelitian kualitatif yang sah dipersyaratkan yaitu wawancara mendalam, observasi, studi dokumen, dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengikuti prosedur sebagaimana yang disarankan oleh Miles and Huberman (Sugiyono, 2009) dengan langkah-langkah, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang dilihat melalui proses perencanaan kegiatan atau penyusunan program sekolah dengan melibatkan unsur guru-guru dan masyarakat akan mendorong terwujudnya keterbukaan dan akan menekan seminim mungkin tingkat kesalahan perencanaan. Kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wahyusumidjo (2006) yang menyebutkan bahwa salah satu peran kepala sekolah memiliki banyak fungsi antara lain sebagai berikut: Sebagai manajer maka kepala sekolah harus memerankan fungsi manajerial dengan melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengoordinasikan (planning, organizing, actuating, dan controlling). Merencanakan berkaitan dengan menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Mengorganisasikan berkaitan dengan mendesain dan membuat struktur organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah memilih orang-orang yang kompeten dalam menjalankan pekerjaan dan mencari sumber-sumber daya pendukung yang paling sesuai. Menggerakkan adalah mempengaruhi orang lain agar bersedia menjalankan tugasnya secara sukarela dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Mengontrol adalah membandingkan apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan perencanaan dilaksanakan dengan matang dan dimusyawarahkan secara terbuka dengan melibatkan semua unsur-unsur yaitu Kepala Sekolah, Guru dan wali murid yang terdiri dari: Proses penyusunan program tersebut memiliki tujuan utama untuk dapat mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. Dalam pelaksanaan program MBS yang bertujuan untuk meningkatkan mutu

pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang.

Penerapan manajemen berbasis sekolah memberikan sekolah kewenangan dalam memenuhi ketersediaan SDM nya yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Namun dalam memenuhi tenaga pendidik dan kependidikan tentu harus memperhatikan peraturan atau standar yang berlaku dan menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Ketersediaan tenaga pendidik di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang sudah memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Rosyidi, M.Pd selaku Kepala SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang. Standar minimal untuk tenaga pendidik sekolah kita yaitu minimal S1. Guru tidak ada yang dibawah S1. Tenaga pendidik berkualifikasi S1 ada 30 orang, dan 14 orang sudah S2, guru yang S1 sekarang menyambil kuliah pasca sarjana ada 13 orang. Jadi 90% sudah memenuhi kualifikasi S1.

Evaluasi Program dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang, sekolah membentuk tim guru piket harian yang bertugas untuk mengawasi terutama kedisiplinan kehadiran siswa dan guru, agar program kerja, dan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara tertib. Evaluasi program kerja sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan oleh badan akreditasi. Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah terhadap SNP dilakukan sendiri oleh kepala sekolah dan belum menjadi budaya menyeluruh di sekolah ini. Evaluasi program sekolah secara interen lebih banyak difokuskan kepada ketercapaian program pembelajaran atau hasil belajar siswa dan belum melihat kepada efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan kinerja guru. Akuntabilitas pelaksanaan

program lemah. Pertanggungjawaban kegiatan dan biaya pelaksanaan program disampaikan kepada pemberi dana berupa laporan tertulis, sedangkan kepada dewan guru hanya disampaikan secara lisan dan secara umum dalam rapat yang dihadiri ketua komite sekolah.

Kemandirian sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu upaya dalam memenuhi sumber daya sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah sangat memberikan kewenangan sekolah dalam mengelola sarana dan prasarananya namun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki SMA Muhammadiyah Kota Palembang sudah lengkap baik itu sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran, dan juga untuk menunjang pekerjaan pegawai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bambang Utoyo selaku wakil kepala sekolah di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang, bagian sarana dan prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah terkait untuk pendidikan komplit semuanya ada. Buku-buku di perpustakaan semuanya lengkap mulai dari buku fiksi dan non fiksi, buku referensi ya semuanya sudah lengkap. Kemudian untuk lab.kimia, lab. Fisika, lab. Biologi juga. Kemudian sarana untuk mengajar seperti proyektor, ada laptop, kemudian ada komputer yang digunakan untuk UNBK. Kemudian juga alat musik/band. Terus untuk fasilitas buat karyawan juga sudah lengkap, setiap meja ada komputer, printer dan lain sebagainya.

Sejalan dengan itu, hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang, telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik dan memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Sekolah sudah memanfaatkan

sumber daya yang tersedia melalui pembagian tugas pada komponen satuan pendidikan. Kemudian membuat dan memiliki beberapa pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis termasuk peraturan akademik, struktur organisasi dan uraian tugas staf tiap komponen sekolah. Namun, pedoman-pedoman dan informasi sekolah tersebut tak mudah diakses oleh publik. Berbagai pedoman tersebut seharusnya mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini, sesuai dengan prinsip transparansi MBS. Dengan adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah, komite sekolah, kemudian dukungan dari lembaga pemerintah atau swasta tentu akan memudahkan sekolah dalam melaksanakan program-programnya.

MBS diharapkan menjadikan sekolah lebih mandiri baik dalam memberdayakan sumber dayanya dan menyelesaikan permasalahannya. Hal yang paling penting dalam MBS harus ada 3 indikator yakni adanya dukungan dana, dukungan fasilitas, dan dukungan tenaga.

Implementasi MBS sangat menjunjung tinggi pelaksanaan sekolah yang transparan, yaitu transparan dalam menyampaikan informasi terkait keuangan sekolah maupun program sekolah. Untuk meningkatkan transparansi di SMA 1 Muhammadiyah melibatkan seluruh warga sekolah yang meliputi guru dan karyawan serta komite dalam penyusunan anggaran dan program sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Karyati selaku Kepala TU SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang “Pihak yang terlibat dalam perumusan keuangan sekolah itu semua manajemen sekolah dari wakasek, dari kepala sekolah, dari TU, dan komite sekolah. Jadi semua manajemen sekolah ikut menentukan RAPBS itu. Komite sekolah juga diikutkan karena juga bertanggung jawab terkait RAPBS”.

Dalam mensosialisasikan program dan keuangan sekolah, SMA 1 Muhammadiyah melaksanakannya melalui kegiatan rapat bersama komite. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan *sense of belonging* seluruh *stakeholder* sekolah dalam mengelola program-program sekolah.

Simpulan

Pelaksanaan dari program implementasi peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang. Evaluasi program dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang, dilaksanakan jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir semester dan akhir tahun. Dalam melaksanakan evaluasi, kepala sekolah membentuk tim supervisi melibatkan pihak internal sekolah terutama guru. Pihak eksternal yang terlibat untuk melakukan evaluasi adalah pengawas sekolah dan Asesor dari Badan Akreditasi Propinsi. Hasil evaluasi pelaksanaan program dibuat laporan yang terdiri dari laporan teknis dan keuangan. Kemandirian sekolah dalam memenuhi ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan sudah tercukupi, dan kemandirian sekolah dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana sudah tercukupi dan memadai. Bentuk Partisipasi, bentuk partisipasi dilihat melalui dukungan dana, fasilitas dan tenaga dari *stakeholder* dalam penyelenggaraan program sekolah. Transparansi sekolah sudah baik, hal ini dilihat dari keterbukaan sekolah dalam menyampaikan informasi melalui kegiatan rapat, papan pengumuman sekolah maupun *website* sekolah.

Dampak yang ditimbulkan adanya implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang, antara lain: 1) Sekolah memiliki kemandirian dalam

mengembangkan SDM; 2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab warga sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 3) Berkembangnya kreativitas sekolah dalam melaksanakan program; 4) Prestasi yang dicapai sekolah. Setelah adanya pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah kota Palembang, terus mengalami peningkatan prestasi baik akademik maupun non akademik; 5) Sekolah memiliki akuntabilitas dalam meningkatkan lulusan yang terserap di PTN dan PTS.

DaftarPustaka

- Duryat, Masduki. (2016). *Kepemimpinan Pendidikan (Meneguhkan Legitimasi dalam Berkontestasi di Bidang Pendidikan)*. Bandung: ALFABETA.
- Engkoswara dan Aan Komariah. (2012). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: ALFABETA. Cet. Ketiga
- Kristiawan, M. (2016). *Telaah Revolusi Mental Dan Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai Dan Berakhlak Mulia*.
- Minarti, Sri. (2011). *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2005.
- Satori dan Komariah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryosubroto, B. (2010). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Husaini. (2013). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Wahyosumidjo. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.